

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abd Muhsin, A. b. (2019). *Setiap Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insana.
- Al-Zuhaili, W. (1997). *Al -Fiqh al-Islami wa Abdillatuh: Juz VI*. Beirut: Dar al Fikr.
- Amirudin, & Bisri, A. Z. (2019). *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek: Sketsa Perjalanan Pilkada 2005*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anam, B. (2018). *Hukum dan Masyarakat Sejarah, Politik dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Andriyan, D. N. (2018). *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anwar, S. (2001). *Metode Penelitian Cetakan III*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shawi, A. A., & Shalah. (2020). *Fiqh Ekonomi Keluarga Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM)*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Budiardjo, M. (2015). *Demokrasi di Indonesia (Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila)*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Cambel. (2020). *Riset dalam Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Djaizuli, A. (2015). *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) cet. Ke-2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, W. (2016). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Friedman, L. M. (2020). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Hamidi, J. (2019). *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media.
- Handoyo, B. H. (2017). *Hukum Tata Negara Indonesia: Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Hasbullah, H. M. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HI, A. R. (2018). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Islamy, M. I. (2018). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail Kahlani Ash-Sau'ami, M. b. (2020). *Subul As-Salam*. Bandung: Dahlan.
- Ismawan, I. (2017). *Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Itang. (2016). *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevasinya dengan Etika Ekonomi Islam*. Banten: Laksita Indonesia.
- Juliansyah, E. (2017). *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

- Kleden, I. (2020). *Partai Politik Indonesia dari Mesin Partai Hingga Volutarisme Politik (Refleksi Wakil Tujuh Partai Politik Indonesia 2020)*. Jakarta: Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum, Cet. 6*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mujani, S. (2019). *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilu Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Mizan Publika.
- Muslich, A. W. (2017). *Pengantar dan Asas Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, R. (2020). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Qardhawi, Y. (2017). *Halal dan Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Samego, I. (2017). *Menata Negara*. Bandung: Mizan.
- Sanit, A. (2018). *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sawiy, K. Y. (2015). *Perbuatan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika Dan Sejarah Politik Kaum Sunni*. Yogyakarta: Safira Insania Press.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, & Hajinoto, R. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Solichin, A. W. (2020). *Analisis Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Negara: Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunarya. (2018). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Risywah*. Jakarta: PT. Mizan Pustaka.
- Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Partnership.

Syagala, S. (2017). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.

Syam, R. (2016). *Pengawas Pemilu*. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka.

Tjandra, W. R. (2017). *Hukum Sarana Pemerintahan*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Widnyani, I. P. (2019). *Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia*. Denpasar: Kereta Kencana.

#### **JURNAL :**

Abdillah, J., & Jamaluddin. (2020). Strategi Pencegahan Politik Uang dan Politisasi Sara dalam Pemilu Serentak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 19.

Alhuda, B. (2020). Efektifitas Gakkumdu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 7.

Anggraini, D., Ariesta, A. W., & Wuryanta, A. E. (2022). Pengaruh Penggunaan Instagram Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pemilihan Umum Presiden RI 2019. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3.

Anjasuma, R., Putra, D. A., & Pradana, S. A. (2023). Praktik Mahar Politik Dalam Partai Politik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Kajian Fiqih Siyasah. *Jurnal El Dusturie*, 15.

Anwar, H., & Boediningsih, W. (2024). Kebijakan Hukum Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Surabaya Dalam Menangani Normalisasi Politik Uang Pada Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4-6.

Haryani, R. (2023). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu. *Jurnal Binamulia Hukum*, 21.

Husaini, A. (2016). Menimbang Kembali Konsep Demokrasi. *Jurnal Publikasi Ilmiah*, 8.

- Indriany, W., & Achmad. (2021). Implementasi Peran Badan Pengawas Pemilu Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) Pada Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Res Publica*, 233-235.
- Irawan, D. (2015). Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10.
- Kasim, A., & Supriyadi. (2019). Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 16.
- Kudamba, M. M. (2023). Analisis Dampak Politik Uang Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 10.
- Kurniawan, K., Putra, D. N., Zikri, A., & AH, N. u. (2020). Konsep Kepemimpinan Dalam Islam. *Jurnal Prokurasi Edukasi Manajemen Pendidikan Islam UIN Imam Bonjol Padang*, 10.
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS KPK RI*, 33.
- Nabilah, R., Afrizal, S., & Bahrudin, F. A. (2022). Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Journal of Social Science and Politics*, 171.
- Nurkinan. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 19.
- Rahmaddani, I. (2022). Tinjauan Yuridis Serta Peran Masyarakat dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Politik Uang (Money Politik) di Pemilihan Umum. *Jurnal Supremasi Hukum*, 19.
- Rohmah, S. D. (2022). Efektivitas Tugas Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam Mencegah Money Politic Pada Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Kesesi. *Manabia Journal of Constitutional Law*, 202.

- Royani, F., & Atika, H. (2019). Efektifitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Sehasen*, 21.
- S, L. A. (2017). Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 75.
- Shela, M. (2018). Peran Bawaslu dalam Mencegah Money Politik dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. *Jurnal Wacana Publik*, 16.
- Simatupang, J., & Subekhan, M. (2018). Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Mediakom*, 130.
- Wardhana, A. F. (2020). Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 16.
- Zen, H. R. (2015). Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah. *Jurnal Al'Adalah*, 522.

#### **WEBSITE :**

- Candra, S. (2024, Februari 14). *Money Politics dalam Penyelenggaraan Pemilu*. Retrieved from <https://umj.ac.id/opini/money-politics-dalam-penyelenggaraan-pemilu/>
- HukumOnline. (2014, April 22). *Kasus Pidana Pemilu di Polri Didominasi Politik Uang*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-pidana-pemilu-di-polri-didominasi-politik-uang-lt53563f475f480/>
- Kab.Sukoharjo, B. (2019, April 2). *Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten*. Retrieved from <https://sukoharjo.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban-bawaslu-kabupaten>

- Kab.Sukoharjo, B. (2020, Juli 3). *Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo*. Retrieved from <https://sukoharjo.bawaslu.go.id/struktur-organisasi-bawaslu-kab-sukoharjo>
- KajianPustaka. (2020, Oktober 16). *Politik Uang/Money Politic (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi)*. Retrieved from <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html>
- Kompas. (2019, Agustus 29). *Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian Dari Pemilu, Tidak Dilarang*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak?page=all>
- Sindonews. (2014, Mei 06). *Pelaku Politik Uang di Sukoharjo di Vonis 6 Bulan Penjara*. Retrieved from <https://nasional.sindonews.com/berita/860828/112/pelaku-politik-uang-di-sukoharjo-divonis-6-bulan-penjara>